

Ketidakadilan Gender Masalah Kolektif

YOGYA (KR) - Sebagai persoalan sosial, ketidakadilan gender bukan masalah perorangan. Tetapi ketidakadilan gender merupakan masalah kolektif yang harus diselesaikan secara integratif dengan menganalisis sejumlah faktor budaya, tradisi dan agama. Faktor agama menjadi semakin penting, mengingat kondisi ketidakadilan gender dalam masyarakat seringkali terkait dengan dominasi interpretasi patriarkhis terhadap ajaran agama. Hal ini bisa dimaklumi karena agama (*religion* dan masyarakat (*society*), lengket sekali.

Rektor IAIN Sunan Kalijaga Prof Dr Amin Abdullah mengemukakan hal tersebut dalam pidato kunci pembukaan Strategic Planning for Gender Mainstreaming di Hotel Sahid, Rabu (15/10). Kegiatan untuk para pejabat IAIN dimotori PSW IAIN Sunan Kalijaga kerjasama dengan McGill Canada juga dihadiri Yuni Chudzaifah, berlangsung hingga Kamis (16/10). Hari pertama juga dilakukan presentasi hasil penelitian *base-line & Institutional Analysis* dalam Pengarusutamaan Gender pada IAIN Sunan Kalijaga.

Dikatakan Amin, isu-isu baru yang muncul sekarang ini *accordnya* adalah masalah keadilan. Sehingga sensitivitasnya dari isu keadilan ini akan menyentuh sekali. Menurut Rektor IAIN Suka tidak dapat diselesaikan dengan teks atau fakta saja. Kalau teks dilawankan teks atau fakta dilawankan fakta. Karena hal ini tidak dapat menghadirkan sensitivitas. "Jadi bukan *text counter text* yang hakikatnya tidak akan menyelesaikan masalah," sebutnya.

Tegas Amin menyebutkan, bila dalam hal ini yang diperlukan adalah sensitivitas baru. Dan di dalam sebuah institusi atau instansi, maka sensitivitas gender ini sangat tergantung pimpinan dalam mengolah. "Dengan tetap menggunakan prinsip-prinsip meritokrasi dan tidak membedakan jenis kelamin, maka dalam sebuah lembaga intervensi pimpinan untuk memberdayakan perempuan, harus dilakukan," tandasnya.

Munculnya isu-isu tersebut menurut Amin harus diakui sebagai dampak meningkatnya pendidikan termasuk bagi kalangan perempuan. Meningkatnya kualitas pendidikan ini sebut Amin Abdullah, memunculkan perempuan-perempuan berkualitas yang mempertanyakan konsep lama dengan dasar keadilan yang terusik. "Seperti masalah kuota 30 persen, dasarnya adalah pemahaman akan adanya ketidakadilan terhadap perempuan," sebutnya.

(Fsy)-a